



Jenis Artikel: Artikel Penelitian

Determinasi Faktor-Faktor Penentu Kualitas Laporan Keuangan: Studi pada SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta

Barbara Gunawan dan Muhammad Humam Alif Ya



AFILIASI:

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

***KORESPONDENSI:**

era@umy.ac.id

DOI: [10.18196/rabin.v9i2.26550](https://doi.org/10.18196/rabin.v9i2.26550)

SITASI:

Gunawan, B., & Ya, M. H. A. (2025). Determinasi Faktor-Faktor Penentu Kualitas Laporan Keuangan: Studi pada SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 9(2), 342-361.

PROSES ARTIKEL

Diterima:

15 Apr 2025

Reviu:

27 Jun 2025

Revisi:

29 Jul 2025

Diterbitkan:

29 Jul 2025



Abstrak

Latar Belakang: Seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, tertib, dan akuntabel, maka kualitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menghasilkan laporan keuangan dituntut semakin optimal. Laporan keuangan yang andal menjadi instrumen penting dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Sebagai implementasi PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang peralihan Standar Akuntansi Pemerintahan dari basis kas ke basis akrual, sejak 2015 seluruh pemerintah daerah diwajibkan menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta.

Metode Penelitian: Desain penelitian kuantitatif dan menggunakan data primer yang diperoleh menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada 27 SKPD yang ada pada Pemerintah Kota Yogyakarta sebanyak 120 kuesioner. Sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Alat analisis yang digunakan adalah Regresi Linear Berganda.

Hasil Penelitian: Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan internal audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Keaslian/Kebaruan Penelitian: Kebaruan penelitian ini terletak pada penambahan Internal Audit sebagai variabel independen dan pada obyek penelitian yang berbeda yaitu pada SKPD Kota Yogyakarta.

Kata Kunci: Kompetensi Sumber Daya Manusia; Teknologi Informasi; Sistem Pengendalian Intern; Internal Audit; Kualitas Laporan Keuangan

Pendahuluan

Meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel mendorong peningkatan ekspektasi terhadap kualitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun laporan keuangan. Berdasarkan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, SKPD merupakan bagian dari struktur pemerintahan daerah yang memiliki fungsi utama sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah SKPD ini dipimpin oleh seorang kepala satuan kerja (Indonesia, 2004).

Salah satu langkah strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan bebas dari praktik korupsi adalah dengan mewajibkan pemerintah daerah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD tersebut mencakup antara lain Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Pemerintah Kota Yogyakarta telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara konsisten dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pencapaian ini mencerminkan komitmen yang tinggi terhadap praktik pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (Psikbpkdev, 2023). Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan untuk terus meningkatkan mutu pelaporan keuangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam mengoperasikan teknologi informasi. Di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), masih terdapat pegawai yang belum menguasai sistem informasi akuntansi dengan baik. Di samping itu, masalah lain yang kerap muncul adalah keterlambatan pengiriman laporan dari SKPD, yang berdampak pada tersendatnya proses rekonsiliasi dan konsolidasi laporan keuangan secara keseluruhan di tingkat pemerintah daerah (Mardiasmo, 2021).

Kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu indikator utama adalah opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam proses evaluasi laporan keuangan, BPK memberikan opini dalam beberapa tingkatan. Tingkatan tertinggi adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), disusul oleh Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) (BPK, 2022). Selain itu, kualitas laporan keuangan juga ditentukan oleh kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang mencakup penyusunan melalui sistem akuntansi pemerintah daerah, ketepatan waktu dalam penyajian informasi keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku (Indonesia, 2010).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan dianggap andal apabila memiliki karakteristik penyajian yang mencerminkan kejujuran, dapat diverifikasi, dan bersifat netral. Kejujuran dalam penyajian berarti bahwa informasi yang disampaikan menggambarkan secara tepat transaksi serta kejadian lain yang memang sepatutnya diungkapkan. Sementara itu, kemampuan diverifikasi menunjukkan bahwa data dalam laporan keuangan dapat diuji, dan hasil pengujian yang dilakukan oleh berbagai pihak, bahkan berulang kali, tetap memberikan simpulan yang konsisten atau tidak berbeda signifikan. Netralitas mengacu pada kondisi di mana penyaji informasi tidak berpihak dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, sehingga penyajiannya tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun eksternal (Sudrajat & Hartini, 2017).

Kualitas laporan keuangan tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis penyusunannya, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor penting seperti Sumber Daya Manusia (SDM), Teknologi Informasi (TI), sistem pengendalian internal, serta fungsi audit internal. Kompetensi SDM memiliki peran krusial dalam proses penyusunan laporan keuangan. Apabila individu yang terlibat memiliki pemahaman yang memadai terhadap regulasi dan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka laporan keuangan dapat disusun secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di samping itu, keberadaan Teknologi Informasi juga menjadi faktor pendukung yang signifikan. Keahlian SDM saja tidak cukup untuk menjamin mutu pelaporan keuangan; pemanfaatan sistem informasi yang memadai turut diperlukan guna meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penyajian laporan keuangan di lingkungan pemerintahan.

Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang kompeten serta dukungan Teknologi Informasi yang memadai seharusnya menjadi modal yang cukup untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Meski demikian, terdapat faktor penting lainnya yang turut berkontribusi dalam peningkatan mutu laporan keuangan pemerintah, yakni keberadaan Pengendalian Intern. Dalam proses penyusunan laporan, tidak jarang terjadi kesalahan, baik yang bersifat tidak disengaja maupun yang disebabkan oleh kelalaian atau manipulasi. Oleh karena itu, diperlukan Sistem Pengendalian Intern yang efektif agar pengguna laporan keuangan merasa yakin terhadap keandalan dan keakuratan informasi yang disajikan. Sistem Pengendalian Intern (SPI) berperan sebagai instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian organisasi secara menyeluruh (Trisnawati & Wiratmaja, 2018).

Audit internal memiliki posisi strategis dalam suatu organisasi karena berkontribusi langsung terhadap penguatan sistem pengendalian internal serta peningkatan kinerja perusahaan yang pada akhirnya berdampak pada kualitas laporan keuangan. Dengan keberadaan fungsi audit internal, idealnya laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan dapat terhindar dari penyimpangan yang signifikan. Namun, kenyataan di lapangan masih menunjukkan bahwa praktik kecurangan dan pelanggaran dalam pelaporan keuangan kerap terjadi. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya peningkatan kualitas kinerja dari audit internal, termasuk kolaborasi yang lebih kuat, guna meminimalkan potensi penyimpangan dalam laporan keuangan (Fauzi & Wardono, 2022).

Penelitian ini memberikan sumbangan dalam tiga dimensi utama, yakni kontribusi teoretis, praktis, dan kebaruan konteks. Dari aspek teoretis, penelitian ini memperluas kajian ilmiah terkait determinan kualitas laporan keuangan di sektor publik, dengan menggabungkan empat variabel kunci kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, serta peran audit internal dalam satu kerangka penelitian yang terpadu. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan oleh pemerintah daerah, khususnya SKPD di Kota Yogyakarta, dalam merancang strategi peningkatan mutu laporan keuangan yang lebih efektif dan bertanggung jawab.

Lebih lanjut, nilai kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada dimasukkannya peran audit internal sebagai variabel independen, yang hingga kini masih jarang dikaji secara mendalam dalam konteks pemerintahan daerah. Selain itu, pemilihan SKPD Kota Yogyakarta sebagai objek penelitian memberikan wawasan empiris yang aktual mengenai tantangan dan praktik pelaporan keuangan di level pemerintah daerah. Oleh karena itu, hasil studi ini diharapkan dapat menjadi referensi penting dalam memperkuat akuntabilitas keuangan sektor publik.

Tinjauan Literatur dan Perumusan Hipotesis

Teori *Stewardship*

Teori *Stewardship* merupakan salah satu pendekatan dalam ilmu manajemen yang membahas hubungan antara pemilik (*principal*) dan pengelola atau manajer (*steward*) dalam suatu organisasi (Davis dkk., 1997). Teori ini menekankan desain manajemen yang menempatkan tanggung jawab pemimpin untuk mengelola sumber daya organisasi secara optimal dan penuh tanggung jawab (Van Der Wal, 2017). Dalam kerangka ini, manajer, seperti halnya pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dipandang sebagai steward yang dipercaya oleh publik (sebagai *principal*) untuk mengelola sumber daya publik demi kepentingan bersama, bukan untuk keuntungan pribadi. Dalam konteks penelitian ini, teori *stewardship* memberikan pijakan konseptual bahwa pegawai SKPD memikul tanggung jawab moral dan profesional dalam menyusun laporan keuangan secara transparan, akurat, dan tepat waktu. Kompetensi sumber daya manusia mencerminkan sejauh mana para steward mampu menjalankan kepercayaan yang diberikan secara efektif. Pemanfaatan teknologi informasi turut menjadi instrumen pendukung yang memungkinkan penyajian informasi keuangan secara cepat, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat. Sementara itu, sistem pengendalian internal berfungsi sebagai alat pengendali yang memastikan para pengelola tetap berada dalam jalur yang benar, bertindak disiplin, serta menghindari penyimpangan wewenang. Selain itu, peran audit internal menjadi elemen penting dalam melakukan fungsi pengawasan guna memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun benar-benar dapat diandalkan dan mencerminkan prinsip akuntabilitas publik. Oleh karena itu, teori *stewardship* sangat tepat digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antara kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal, serta fungsi audit internal terhadap kualitas laporan keuangan di lingkungan pemerintahan daerah.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Dalam pandangan teori *stewardship*, pegawai yang memiliki kompetensi tinggi cenderung menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan menyusun laporan keuangan secara transparan dan akurat sebagai bentuk kesetiaan terhadap organisasi. Keberhasilan dalam menghasilkan laporan keuangan yang bermutu sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Berbagai temuan empiris menguatkan pentingnya peran kompetensi SDM dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Studi oleh Sundari dan Rahayu (2019) menunjukkan bahwa kompetensi pegawai memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap mutu laporan keuangan, yang berarti bahwa pemahaman yang baik terhadap regulasi dan standar akuntansi memungkinkan penyusunan laporan yang relevan dan dapat dipercaya. Temuan sejalan diungkapkan oleh Admaja dan Wahyundaru (2020) yang menekankan bahwa kompetensi SDM merupakan faktor kunci dalam mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Lebih lanjut, penelitian oleh Imelia dkk. (2021) mengidentifikasi bahwa keterampilan teknis, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan formal pegawai akuntansi sektor publik memiliki keterkaitan yang erat dengan kemampuannya dalam menyusun laporan keuangan yang tepat waktu serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil serupa juga

ditunjukkan oleh Alzoubi (2019) yang menekankan bahwa kualitas SDM akuntansi internal memiliki pengaruh signifikan terhadap keandalan laporan keuangan. Haustein dan C. Lorson (2023) dalam studi pada pemerintahan lokal di Eropa, menemukan bahwa pelatihan dan peningkatan kapasitas pegawai keuangan publik berkontribusi terhadap peningkatan kualitas akuntansi serta transparansi fiskal. Dukungan lebih lanjut datang dari Pham dkk. (2021) yang menyatakan bahwa kemampuan SDM sangat penting dalam penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual secara efektif. Berdasarkan teori serta bukti empiris tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia dalam lingkungan organisasi pemerintahan, semakin besar pula peluang untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Oleh karena itu, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Teknologi Informasi

Teknologi informasi merujuk pada seluruh bentuk teknologi yang digunakan dalam pemrosesan informasi secara elektronik. Teknologi ini mencakup elemen-elemen seperti perangkat keras, perangkat lunak, jaringan data, serta sistem informasi berbasis komputer yang mendukung kelancaran kegiatan bisnis dan administratif dalam suatu organisasi. Dalam ranah pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi menjadi aspek krusial untuk meningkatkan efisiensi, ketepatan, dan transparansi dalam penyusunan laporan keuangan. Penggunaan teknologi ini memungkinkan percepatan pemrosesan data, meminimalisasi kesalahan manual, serta mempermudah penyimpanan dan pelaporan informasi secara real-time. Setyowati dkk. (2016) mengemukakan bahwa teknologi informasi dapat mempercepat proses penyusunan laporan keuangan dan meningkatkan keandalan atas data transaksi. Dukungan serupa disampaikan oleh Imelia dkk. (2021) yang menemukan bahwa teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan, khususnya dalam hal ketepatan waktu, akurasi, dan keandalan. Binawati dan Nindyaningsih (2022) juga menegaskan bahwa integrasi sistem akuntansi berbasis teknologi membantu lembaga dalam menyajikan informasi keuangan yang sesuai standar dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian oleh Cahmawati dan Romandhon (2021) memperkuat pandangan ini dengan menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam sektor publik berdampak positif pada kecepatan dan transparansi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil serupa juga tercermin dalam penelitian internasional, seperti yang disampaikan oleh Lubis dkk. (2023) yang menunjukkan bahwa digitalisasi akuntansi sektor publik meningkatkan keandalan data dan akuntabilitas fiskal. Sarker dan Sharif (2024) menambahkan bahwa penerapan teknologi informasi akuntansi mendukung efektivitas pelaporan dan pengambilan keputusan di sektor publik. Selain itu, studi oleh Sáenz dkk. (2024) mengungkapkan bahwa adopsi platform digital berbasis cloud turut mendorong efisiensi dan keterbukaan dalam pelaporan keuangan pemerintah. Dalam kerangka teori *stewardship*, teknologi informasi dipandang sebagai sarana penting yang memungkinkan para pegawai SKPD selaku *steward* menyampaikan informasi keuangan secara transparan

dan efisien kepada masyarakat sebagai principal. Teori ini menekankan pentingnya kerja sama antara steward dan principal dalam mencapai tujuan organisasi melalui perilaku yang bertanggung jawab (Davis dkk., 1997). Oleh karena itu, penggunaan teknologi oleh aparatur pemerintah mencerminkan komitmen moral untuk menyediakan laporan keuangan yang akuntabel dan mudah diakses publik (Van Der Wal, 2017). Berdasarkan pemikiran tersebut, semakin optimal pemanfaatan teknologi informasi dalam lingkungan pemerintahan, semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan seperangkat kebijakan, prosedur, dan praktik yang dirancang serta diimplementasikan dalam suatu organisasi untuk menjamin tercapainya tujuan operasional, perlindungan terhadap aset, keakuratan dan keandalan informasi keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks organisasi sektor publik seperti SKPD SPI memainkan peran penting dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan, serta memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)*, sistem pengendalian intern merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya, yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tiga tujuan utama, yaitu: (1) efektivitas dan efisiensi operasional, (2) keandalan pelaporan keuangan, dan (3) kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku (Framework, 2013). Berbagai penelitian empiris mendukung pentingnya peran SPI dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Studi oleh Aziyah dan Yanto (2022) menunjukkan bahwa penerapan SPI berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, yang mencakup aspek relevansi, keandalan, dan ketepatan waktu. Hasil ini diperkuat oleh penelitian Indrayani dan Widiastuti (2020) yang menemukan bahwa SPI yang efektif secara signifikan meningkatkan akurasi, kelengkapan, dan penyajian laporan keuangan yang tepat waktu. Penelitian oleh Widyastuti dan Wulandari (2024) juga menegaskan bahwa implementasi SPI yang baik dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap informasi keuangan yang disajikan oleh SKPD. Penelitian internasional oleh Aquino dkk. (2021) juga mengungkapkan bahwa struktur pengendalian intern yang kuat berkontribusi besar terhadap efektivitas tata kelola dan pengurangan risiko kecurangan dalam sektor publik. Demikian pula, Alsharari (2022) menegaskan bahwa integrasi pengendalian internal dalam sistem akuntansi sektor publik mendukung peningkatan keandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap standar pelaporan. Studi oleh Nogueira dan Jorge (2024) di sektor pemerintahan daerah di Eropa menunjukkan bahwa mekanisme kontrol internal yang diterapkan secara konsisten memperkuat transparansi fiskal dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Dalam perspektif teori stewardship, sistem pengendalian intern merupakan mekanisme penting yang mendukung peran aparatur pemerintah sebagai steward, yaitu pelayan publik yang bertanggung jawab

terhadap pengelolaan sumber daya secara optimal dan berintegritas. Steward yang bertindak secara bertanggung jawab akan menggunakan SPI sebagai alat kontrol dalam meminimalisir risiko penyimpangan dan menjamin bahwa proses pelaporan keuangan berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik (Davis dkk., 1997). SPI membantu steward menjalankan amanah dari *principal* (masyarakat) secara profesional, sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dengan demikian, penerapan SPI yang kuat dan konsisten menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan Keuangan.

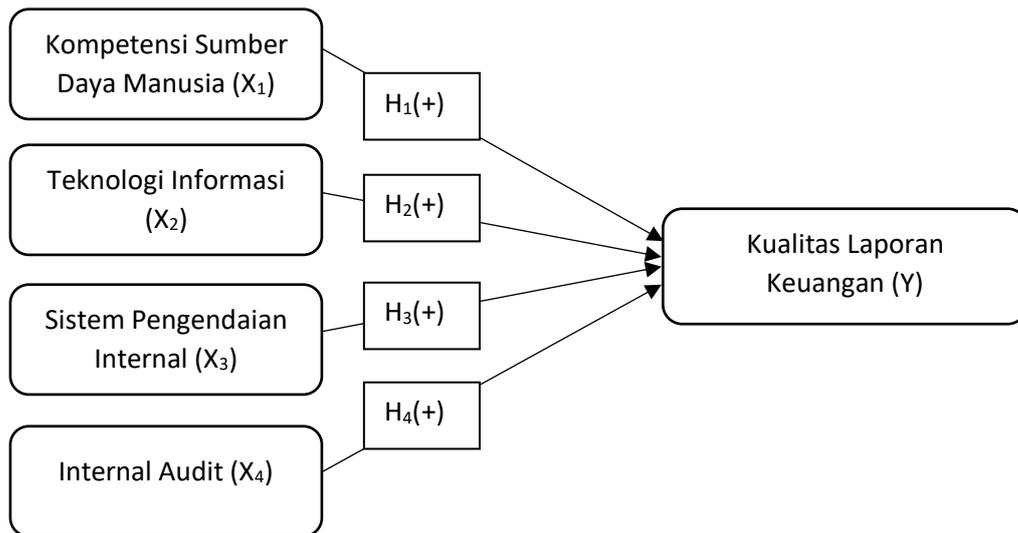
Internal Audit

Institute of Internal Auditors (IIA) merumuskan definisi internal audit sebagai aktivitas independen yang membantu memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional organisasi. Tujuan utama dari internal audit adalah memberikan kepercayaan kepada manajemen bahwa sudah dirancang dengan baik dan bermanfaat sesuai dengan yang diharapkan. Kajian internal audit, atau yang biasa disebut Audit Internal, adalah sistem penilaian yang sistematis dan objektif pada efektivitas SPI dalam suatu organisasi. Penelitian oleh Mashitoh dkk. (2024), menunjukkan bahwa internal audit memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini disebabkan oleh peran auditor internal dalam mengevaluasi keakuratan data, mengidentifikasi kelemahan dalam sistem, serta memberikan rekomendasi perbaikan secara berkesinambungan. Hasil serupa juga ditunjukkan oleh Dsouza (2021) yang menyatakan bahwa kualitas audit internal meliputi independensi, kompetensi, ruang lingkup kerja, dan efektivitas komunikasi berkorelasi positif dengan kestabilan dan integritas laporan keuangan. Penelitian lain oleh Cahmawati dan Romandhon (2021) juga memperkuat bahwa keterlibatan auditor internal yang aktif dan profesional dapat meningkatkan transparansi dan keandalan pelaporan keuangan sektor publik. Selain itu, studi oleh Alzeban (2022) menegaskan bahwa efektivitas fungsi audit internal secara signifikan terkait dengan persepsi transparansi dan akuntabilitas keuangan pada sektor publik di negara berkembang. Temuan dari Saini dkk. (2023) juga menunjukkan bahwa audit internal berperan dalam mengurangi risiko manipulasi data keuangan dan memperkuat tata kelola keuangan publik. Dukungan juga datang dari penelitian Nasution dkk. (2025) yang menemukan bahwa kolaborasi antara manajemen dan auditor internal mendorong peningkatan kualitas pelaporan melalui praktik evaluasi dan rekomendasi yang berkelanjutan. Dalam konteks teori stewardship, internal audit menjadi bagian penting dari tanggung jawab moral dan profesional para steward dalam memastikan bahwa pelaporan keuangan dilakukan secara jujur, transparan, dan sesuai dengan kepentingan publik. Davis dkk. (1997) menekankan bahwa para steward memiliki orientasi intrinsik untuk bertindak demi kepentingan organisasi dan *principal*-nya. Dengan adanya fungsi audit internal yang efektif, para pegawai pemerintah sebagai steward memiliki alat pengawasan internal yang membantu mereka menjaga akuntabilitas dan integritas dalam

menyusun laporan keuangan. Oleh karena itu, keberadaan audit internal tidak hanya sebagai mekanisme pengawasan, tetapi juga sebagai katalis untuk menciptakan pelaporan keuangan yang andal dan dipercaya oleh pemangku kepentingan. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₄: *Internal audit berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.*

Berdasarkan pengembangan hipotesis maka Gambar 1 disajikan model penelitian.



Gambar 1 Model Penelitian

Metode Penelitian

Penelitian ini menargetkan responden yang berasal dari pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Responden yang dimaksud meliputi pejabat struktural serta aparatur yang memiliki tanggung jawab dalam fungsi akuntansi atau tata usaha keuangan, dan telah memiliki pengalaman kerja minimal satu tahun dalam proses penyusunan laporan keuangan. Di tingkat Pemerintah Kota Yogyakarta, terdapat 27 SKPD yang menjadi objek penelitian, terdiri atas 18 dinas, 5 badan, 1 sekretariat, 1 inspektorat, 1 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan 1 satuan polisi pamong praja. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan sumber data primer. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling, dengan kriteria tertentu yang telah ditentukan peneliti. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner (angket) kepada pegawai di masing-masing SKPD, dengan waktu pengisian selama tujuh hari. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak *Statistical Program for Social Science (SPSS)* versi 22.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, karakteristik dari kualitas laporan keuangan merujuk pada standar normatif yang seharusnya tercermin dalam informasi akuntansi agar dapat mencapai tujuannya. Dalam penelitian ini, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dijadikan sebagai variabel dependen, yang diukur menggunakan beberapa indikator seperti relevansi, keandalan, keterbandingan, dan kemudahan pemahaman. Adapun variabel independennya meliputi kompetensi sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, serta audit internal. Keberadaan sumber daya manusia memiliki peran krusial dalam proses penyusunan laporan keuangan, di mana tingkat kompetensinya sangat menentukan tercapainya laporan keuangan yang berkualitas (Admaja & Wahyundaru, 2020). Teknologi informasi dalam hal ini dimaknai sebagai penggunaan perangkat keras, perangkat lunak, basis data, jaringan internet, hingga e-commerce secara maksimal (Puspita dkk., 2020). Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 mengenai Sistem Informasi Keuangan Daerah menegaskan bahwa baik pemerintah pusat maupun daerah bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan daerah serta transparansi informasi keuangan kepada masyarakat. Sistem pengendalian internal adalah serangkaian kebijakan serta prosedur yang disusun untuk memberikan keyakinan kepada manajemen bahwa tujuan organisasi dapat dicapai dengan efektif (Indrayani & Widiastuti, 2020). Kumaat (2011) dalam Muranto dkk. (2020) menjelaskan bahwa SPI berfungsi sebagai mekanisme dalam mengatur, memantau, serta mengevaluasi sumber daya organisasi dan sangat esensial untuk mendeteksi serta mencegah tindakan kecurangan. Sedangkan audit internal dalam lingkup pelaporan keuangan berperan dalam memberikan jaminan atas keandalan laporan keuangan dan efektivitas pengendalian internal yang terkait dengan proses pencatatan maupun pelaporan transaksi keuangan (Institute of Internal Auditors, 2017).

Teknik Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 22 dengan berbagai pengujian statistik, antara lain statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, serta uji hipotesis. Statistik deskriptif dimanfaatkan untuk mengelola, menyusun, serta menyajikan data agar memperoleh gambaran umum mengenai karakteristik data yang dapat memudahkan proses analisis dan penafsiran. Uji validitas bertujuan untuk mengukur sejauh mana instrumen atau item dalam kuesioner benar-benar mampu merepresentasikan variabel yang diteliti. Instrumen dikatakan valid apabila butir pertanyaannya mampu mengungkap secara tepat konsep yang diukur (Ghozali, 2018). Selanjutnya, uji reliabilitas digunakan untuk menilai konsistensi alat ukur dalam mengukur indikator pada setiap variabel (Ghozali, 2018). Suatu kuesioner dikategorikan reliabel jika hasil jawaban dari responden menunjukkan konsistensi dan kestabilan dalam waktu yang berbeda. Uji asumsi klasik meliputi pengujian terhadap normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, yang diperlukan untuk memastikan model regresi yang digunakan sesuai dengan syarat dasar analisis regresi. Terakhir, uji hipotesis mencakup analisis regresi linier berganda, uji F, koefisien determinasi (*Adjusted R²*), serta uji t untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang berasal dari SKPD di Kota Yogyakarta. Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah pejabat struktural serta aparat pelaksana fungsi akuntansi atau tata usaha keuangan pada masing-masing SKPD yang telah memiliki pengalaman kerja minimal satu tahun dalam proses penyusunan laporan keuangan.

Tabel 1 Hasil Penyebaran Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Jumlah Kuesioner yang disebar	120	100%
Jumlah Kuesioner yang tidak Kembali	18	15%
Jumlah Kuesioner yang diolah	102	85%

Pengumpulan data dilakukan secara langsung pada bulan Maret 2025 dengan metode penyebaran kuesioner dua kali dalam seminggu. Pengambilan kembali kuesioner dilakukan dua minggu setelah waktu penyebaran. Jumlah kuesioner yang berhasil dikumpulkan dan dapat digunakan dalam penelitian ini sebanyak 102 responden, sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Profil lengkap profil responden ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2 Profil Responden

Kategori	Keterangan	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	53	51,96 %
	Perempuan	49	48,04 %
	Total	102	100 %
Usia Responden	21-30 tahun	32	31,4 %
	31-40 tahun	53	52,0 %
	41-50 tahun	14	13,7 %
	> 50 tahun	3	2,9 %
Pendidikan Terakhir	SMA/SMK/Sederajat	11	10,8%
	Diploma 3	10	9,8%
	Strata 1	69	67,6%
	Strata 2	10	9,8%
	Strata 3	2	2%
Lama Bekerja Responden	1-5	41	40,2%
	5-10	43	42,2%
	>10	18	17,6%
Latar Belakang Pendidikan Terakhir	Akuntansi	32	31,4%
	Manajemen	52	51,0%
	Pertanian	4	3,9%
	Teknik	7	6,9%
	Lain-Lain	7	6,9%

Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa responden dalam penelitian ini terdiri dari 53 orang laki-laki (51,96%) dan 49 orang perempuan (48,04%), menunjukkan bahwa jumlah responden laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Dari segi usia, mayoritas responden berada pada rentang usia 31–40 tahun yaitu sebanyak 53 orang (52%). Sementara itu, responden yang berusia lebih dari 50 tahun hanya sebanyak 3 orang (2,94%). Ditinjau dari tingkat pendidikan, sebagian besar responden memiliki latar belakang pendidikan terakhir Strata 1 (S1), yaitu sebanyak 69 orang (67,6%). Adapun berdasarkan program studi, mayoritas responden berasal dari Program Studi Manajemen sebanyak 52 orang (51%), disusul oleh Program Studi Akuntansi sebanyak 32 orang (31%). Dilihat dari lama bekerja, sebanyak 41 responden (40,2%) telah bekerja selama 1–5 tahun, sebanyak 43 responden (42,2%) telah bekerja selama 5–10 tahun, dan sebanyak 18 responden (17,6%) telah bekerja lebih dari 10 tahun. Informasi lengkap mengenai karakteristik responden dapat dilihat pada Tabel 2.

Uji Kualitas Instrumen dan Data

Tabel 3 Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kualitas Laporan Keuangan	102	22	55	46,45	8,447
Kompetensi Sumber Daya Manusia	102	16	35	28,95	5,152
Teknologi Informasi	102	13	30	24,42	4,563
Sistem Pengendalian Intern	102	18	50	40,66	7,594
Internal Audit	102	55	120	97,97	17,245

Merujuk pada Tabel 3, diperoleh data dari 102 responden yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Yogyakarta. Variabel Kualitas Laporan Keuangan menunjukkan rentang skor antara 22 hingga 55, dengan rata-rata sebesar 46,45 dan simpangan baku 8,447. Sementara itu, pada variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia, nilai terendah tercatat 16 dan tertinggi 35, dengan nilai rata-rata 28,95 serta standar deviasi 5,152. Untuk variabel Teknologi Informasi, diperoleh nilai minimum 13 dan maksimum 30, dengan rata-rata sebesar 24,42 dan deviasi standar sebesar 4,563. Pada variabel Sistem Pengendalian Intern, ditemukan nilai terkecil sebesar 18 dan tertinggi 50, dengan nilai tengah 40,66 serta simpangan baku 7,594. Adapun variabel Internal Audit memiliki rentang nilai dari 55 hingga 120, dengan nilai rata-rata 97,97 dan standar deviasi sebesar 17,245.

Tabel 4 Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	R Hitung	Sig.	Keterangan
Kualitas Laporan Keuangan	Y.1	0,859	0,000	Valid
	Y.2	0,921	0,000	Valid
	Y.3	0,896	0,000	Valid
	Y.4	0,936	0,000	Valid
	Y.5	0,840	0,000	Valid
	Y.6	0,884	0,000	Valid
	Y.7	0,911	0,000	Valid
	Y.8	0,901	0,000	Valid
	Y.9	0,915	0,000	Valid

Tabel 4 Uji Validitas (lanjutan)

Variabel	Item Pertanyaan	R Hitung	Sig.	Keterangan
Kompetensi Sumber Daya Manusia	Y.10	0,890	0,000	Valid
	Y.11	0,929	0,000	Valid
	X1.1	0,892	0,000	Valid
	X1.2	0,854	0,000	Valid
	X1.3	0,806	0,000	Valid
	X1.4	0,860	0,000	Valid
	X1.5	0,864	0,000	Valid
Teknologi Informasi	X1.6	0,896	0,000	Valid
	X1.7	0,873	0,000	Valid
	X2.1	0,736	0,000	Valid
	X2.2	0,888	0,000	Valid
	X2.3	0,919	0,000	Valid
	X2.4	0,906	0,000	Valid
Sistem Pengendalian Internal	X2.5	0,899	0,000	Valid
	X2.6	0,801	0,000	Valid
	X3.1	0,911	0,000	Valid
	X3.2	0,899	0,000	Valid
	X3.3	0,898	0,000	Valid
	X3.4	0,739	0,000	Valid
	X3.5	0,663	0,000	Valid
Internal Audit	X3.6	0,855	0,000	Valid
	X3.7	0,896	0,000	Valid
	X3.8	0,906	0,000	Valid
	X3.9	0,906	0,000	Valid
	X3.10	0,904	0,000	Valid
	X4.1	0,898	0,000	Valid
	X4.2	0,894	0,000	Valid
	X4.3	0,897	0,000	Valid
	X4.4	0,839	0,000	Valid
	X4.5	0,933	0,000	Valid
	X4.6	0,901	0,000	Valid
	X4.7	0,873	0,000	Valid
	X4.8	0,916	0,000	Valid
	X4.9	0,874	0,000	Valid
	X4.10	0,808	0,000	Valid
	X4.11	0,893	0,000	Valid
	X4.12	0,884	0,000	Valid
X4.13	0,841	0,000	Valid	
X4.14	0,931	0,000	Valid	
X4.15	0,897	0,000	Valid	
X4.16	0,885	0,000	Valid	
X4.17	0,922	0,000	Valid	
X4.18	0,920	0,000	Valid	
X4.19	0,901	0,000	Valid	
X4.20	0,890	0,000	Valid	
X4.21	0,923	0,000	Valid	
X4.22	0,867	0,000	Valid	
X4.23	0,815	0,000	Valid	
X4.24	0,900	0,000	Valid	

Berdasarkan hasil uji validitas yang tercantum pada Tabel 4 dengan total 102 responden, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan yang berkaitan dengan variabel Kualitas Laporan Keuangan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, dan Internal Audit, yang diberikan kepada pegawai SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta, menunjukkan hasil valid. Hal ini disebabkan oleh nilai signifikansi tiap butir pertanyaan yang berada di bawah ambang batas 5% atau 0,05. Dengan demikian, seluruh item dalam kuesioner dapat dinyatakan memenuhi syarat sebagai alat ukur yang sah untuk pengumpulan data dalam penelitian ini.

Tabel 5 Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kualitas Laporan Keuangan	0,976	Reliabel
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,943	Reliabel
Teknologi Informasi	0,929	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal	0,958	Reliabel
Internal Audit	0,988	Reliabel

Merujuk pada hasil uji reliabilitas yang disajikan dalam Tabel 5, diketahui bahwa nilai Cronbach's Alpha untuk seluruh variabel dalam penelitian ini, berdasarkan data dari 102 responden, telah melampaui batas minimum sebesar 0,70. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dinyatakan reliabel karena telah memenuhi standar yang ditetapkan.

Tabel 6 Uji Normalitas

Keterangan	
N	102
Kolmogorov-Smirnov Asympt.Sig. (2-Tailed)	0,200

Mengacu pada Tabel 6, diperoleh nilai Asympt.Sig. (2-Tailed) untuk residual variabel penelitian sebesar 0,200. Nilai ini melebihi ambang batas 0,05 atau 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual dari variabel dalam penelitian ini mengikuti distribusi normal.

Tabel 7 Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	VIF	VIF	
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,556	1,799	Tidak terjadi multikolinearitas
Teknologi Informasi	0,601	1,665	Tidak terjadi multikolinearitas
Sistem Pengendalian Intern	0,691	1,447	Tidak terjadi multikolinearitas
Internal Audit	0,693	1,444	Tidak terjadi multikolinearitas

Berdasarkan Tabel 7, seluruh variabel independen dalam penelitian ini menunjukkan nilai *variance inflation factor* (VIF) yang berada di bawah angka 10, serta nilai tolerance yang

melebihi 0,10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak mengindikasikan adanya gejala multikolinearitas.

Tabel 8 Uji Heteroskedastisitas

Model	Nilai Sig.	Keterangan
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,745	Tidak Ada Heteroskedastisitas
Teknologi Informasi	0,297	Tidak Ada Heteroskedastisitas
Sistem Pengendalian Intern	0,123	Tidak Ada Heteroskedastisitas
Internal Audit	0,799	Tidak Ada Heteroskedastisitas

Mengacu pada Tabel 8, seluruh variabel independen memiliki tingkat signifikansi yang melebihi angka 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini tidak mengalami permasalahan heteroskedastisitas.

Tabel 9 Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	4335,673	4	1083,918	36,614	,000b
Residual	2871,582	97	29,604		
Total	7207,255	101			

Berdasarkan hasil uji F yang ditampilkan pada Tabel 9, diperoleh nilai F hitung sebesar 36,614 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, dan Internal Audit secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Tabel 10 Uji Koefisiensi Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,776a	0,602	0,585	5,441

Mengacu pada Tabel 10, nilai koefisien determinasi yang disesuaikan (*Adjusted R²*) sebesar 0,585. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel independen secara kolektif mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen sebesar 58,5%, sedangkan sisanya yaitu 41,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak tercakup dalam model penelitian ini.

Tabel 11 Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,121	3,877		0,031	0,975
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,481	0,141	0,294	3,415	0,001
Teknologi Informasi	0,306	0,153	0,165	1,997	0,049
Sistem Pengendalian Intern	0,285	0,086	0,256	3,323	0,001
Internal Audit	0,136	0,038	0,278	3,609	0,000

Berdasarkan data pada Tabel 11, diketahui bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki nilai t-hitung sebesar 3,415 dengan koefisien regresi sebesar 0,481 dan tingkat signifikansi 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, sehingga Hipotesis 1 dinyatakan diterima. Sementara itu, variabel Teknologi Informasi menunjukkan t-hitung sebesar 1,997 dengan koefisien regresi 0,306 dan nilai signifikansi sebesar 0,049 yang juga berada di bawah ambang batas 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Teknologi Informasi memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, sehingga Hipotesis 2 diterima. Selanjutnya, variabel Sistem Pengendalian Intern memperoleh nilai t-hitung sebesar 3,323 dengan koefisien regresi sebesar 0,285 dan nilai signifikansi 0,001. Hasil ini mengindikasikan bahwa Sistem Pengendalian Intern secara positif dan signifikan memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan, maka Hipotesis 3 dinyatakan diterima. Terakhir, variabel Internal Audit mencatatkan t-hitung sebesar 3,609 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,136 serta tingkat signifikansi 0,000. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Internal Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hipotesis 4 pun diterima dalam penelitian ini.

Pembahasan

Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (H₁)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama, diperoleh bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga hipotesis H1 diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia, khususnya pada SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hal ini mengindikasikan bahwa penguasaan pengetahuan, keterampilan teknis, serta pemahaman terhadap standar akuntansi dan regulasi keuangan merupakan faktor penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal, relevan, dan tepat waktu. Pegawai yang kompeten mampu menjalankan proses pencatatan, pelaporan, dan pengungkapan informasi keuangan secara lebih akurat dan efisien, sehingga mendukung terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Admaja & Wahyundaru, 2020; Alzoubi, 2019; Haustein & C. Lorson, 2023; Imelia dkk., 2021; Sundari & Rahayu, 2019) yang secara konsisten menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sektor publik.

Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (H₂)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, hipotesis kedua dalam penelitian ini dinyatakan diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat pemanfaatan teknologi informasi yang tinggi dapat mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pada konteks SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta, pemanfaatan teknologi informasi telah membantu

dalam proses penyusunan laporan keuangan yang lebih akurat, efisien, dan tepat waktu. Teknologi informasi memberikan kemudahan dalam pengelolaan dan akses terhadap data keuangan, sehingga meminimalkan kesalahan, mempercepat proses pelaporan, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas keuangan publik. Oleh karena itu, penerapan sistem informasi keuangan yang andal dan terintegrasi menjadi faktor penting dalam mendukung penyusunan laporan keuangan berkualitas. Hasil penelitian ini sejalan dengan studi sebelumnya yang dilakukan oleh (Binawati & Nindyaningsih, 2022; Cahmawati & Romandhon, 2021; Lubis dkk., 2023; Sarker & Sharif, 2024) yang secara konsisten menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan.

Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (H₃)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, hipotesis ketiga dalam penelitian ini dinyatakan diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem pengendalian internal dalam suatu organisasi, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Pada konteks SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta, penerapan sistem pengendalian internal telah dilakukan secara memadai. Hal ini berdampak positif dalam menciptakan lingkungan kerja yang tertib, terkendali, dan efisien, serta mendorong tercapainya efektivitas dalam proses pelaporan keuangan. Sistem pengendalian internal yang baik mampu mencegah terjadinya kesalahan dan kecurangan, serta memastikan bahwa pelaporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Hasil penelitian ini konsisten dengan studi terdahulu yang dilakukan oleh (Alsharari, 2022; Aquino dkk., 2021; Aziyah & Yanto, 2022; Indrayani & Widiastuti, 2020; Widyastuti & Wulandari, 2024) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (H₄)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, penelitian ini menunjukkan bahwa internal audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, hipotesis H4 dalam penelitian ini diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kualitas pelaksanaan fungsi audit internal, maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Fungsi internal audit memainkan peran penting dalam menilai dan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal, tata kelola, serta proses manajemen risiko dalam organisasi. Internal auditor yang kompeten dan profesional mampu memberikan penilaian objektif dan rekomendasi perbaikan yang dapat meningkatkan keandalan informasi keuangan yang disajikan. Auditor internal juga bertindak sebagai mitra strategis manajemen dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan. Dengan peran pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh internal auditor, proses penyusunan laporan keuangan menjadi lebih sistematis, terdokumentasi dengan baik, dan bebas dari kesalahan material, sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, keterlibatan aktif dan efektif dari fungsi

internal audit sangat penting dalam mewujudkan laporan keuangan yang andal, relevan, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan dari penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh (Alzeban, 2022; Cahmawati & Romandhon, 2021; Dsouza, 2021; Mashitoh dkk., 2024; Saini dkk., 2023) yang secara konsisten menunjukkan bahwa internal audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di sektor publik maupun swasta.

Kesimpulan

Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia di SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta sudah memenuhi kompetensi yang dibutuhkan. Dengan memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dapat mempersingkat dalam penyusunan laporan keuangan dan mendapatkan kualitas laporan keuangan yang handal dan relevan. Teknologi informasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta telah memanfaatkan teknologi informasi dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan penggunaan teknologi informasi telah memberikan peluang pemanfaatan kepada berbagai pihak untuk mendaya gunakan, mengelola, mengakses informasi keuangan secara efektif, efisien, akurat, andal dan tepat waktu. Pengendalian internal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian yang dilakukan oleh bahwa SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta sudah menunjukkan hasil yang baik dan sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Internal audit berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini membuktikan bahwa peran internal audit di SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta yang berdasarkan profesionalisme, efektivitas, dan kualitas dari kinerja internal auditor semakin memperkuat sistem pengawasan dalam penyusunan laporan keuangan dan menghasilkan Laporan Keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan penelitian ini, maka beberapa saran dapat diajukan bagi peneliti selanjutnya. Pertama, disarankan agar penelitian mendatang mengeksplorasi lebih dalam aspek Penerapan Teknologi Informasi yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan. Kedua, untuk memperoleh data yang lebih valid dan mendalam, peneliti berikutnya diharapkan dapat melakukan wawancara langsung dengan responden. Selain itu, pengembangan penelitian dengan cakupan sampel yang lebih luas dan variatif juga dianjurkan guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan generalisabel.

Keterbatasan pada penelitian ini salah satunya adalah karena masih menggunakan kuesioner hard file yang mana membutuhkan waktu dalam mendistribusikan ke SKPD sebagai sampel yang akan diambil, sehingga memakan waktu yang lama dalam pengambilan sampel, diharapkan peneliti berikutnya dapat membuat kuesioner online agar memudahkan dalam pendistribusian kuesioner dan pengisiannya. Selanjutnya, Penelitian ini menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data dan tidak didukung

dengan wawancara langsung terhadap responden. Dengan begitu ada kemungkinan responden menjawab kuesioner tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi.

Daftar Pustaka

- Admaja, D. D., & Wahyundaru, S. D. (2020). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap terciptanya kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Ekonomi*.
<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimue/article/view/11646>
- Alsharari, N. M. (2022). Risk management practices and trade facilitation as influenced by public sector reforms: Institutional isomorphism. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 18(2), 192–216. <https://doi.org/10.1108/JAOC-11-2018-0117>
- Alzeban, A. (2022). CEO characteristics, management support for internal audit and corporate performance: An analysis of listed Malaysian companies. *Managerial Auditing Journal*, 37(1), 102–128. <https://doi.org/10.1108/MAJ-02-2021-3012>
- Alzoubi, E. S. S. (2019). Audit committee, internal audit function and earnings management: Evidence from Jordan. *Meditari Accountancy Research*, 27(1), 72–90. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-06-2017-0160>
- Aquino, F. L., Pressacco, C. F., & Spikin, I. C. (2021). Impactos desiguales de las cuarentenas en los ingresos municipales: Desafíos en la gestión financiera de emergencia y resiliencia local. *Revista Iberoamericana de Estudios Municipales*, 24, 1–23. <https://doi.org/10.32457/10.32457/riem24.1448>
- Aziyah, W., & Yanto, H. (2022). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderating. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 977–989. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.686>
- Binawati, E., & Nindyaningsih, C. T. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Optimal*, 19(1), 19–39. <https://doi.org/10.61132/rimba.v1i4.317>
- BPK. (2022). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) | BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta*. <https://jakarta.bpk.go.id/ikhtisar-hasil-pemeriksaan-semester-ihps/>
- Cahmawati, C., & Romandhon, R. (2021). Pengaruh Peran Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Audit Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 2(2), 226–234. <https://doi.org/10.32500/jebe.v2i2.1737>
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a stewardship theory of management. *Academy of Management Review*, 22(1), 20–47. <https://doi.org/10.2307/259223>
- Dsouza, S. (2021). Impact of internal audit quality on financial stability. *Journal of Commerce and Accounting Research*. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3955993
- Fauzi, E., & Wardono, D. U. (2022). Peran internal audit atas kualitas laporan keuangan pada perusahaan. *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi*, 7(1), 52–61. <https://doi.org/10.21067/jrpe.v7i1.6277>
- Framework, C. (2013). Internal Control-Integrated Framework Executive Summary. *Coso (Issue May 2013)*.

- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan IBM SPSS 25 Edisi 9*. Badan Penerbit Ponorogo. <https://onesearch.id/Record/IOS2851.slims-19545>
- Haustein, E., & C. Lorson, P. (2023). Transparency of local government financial statements: Analyzing citizens' perceptions. *Financial Accountability & Management*, 39(2), 375–393. <https://doi.org/10.1111/faam.12353>
- Imelia, D., Rahayu, S., & Wiralestari, W. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemda Kerinci. *JAKU (Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja)(E-Journal)*, 6(3), 149–163. <https://doi.org/10.22437/jaku.v6i3.16112>
- Indonesia, P. P. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/40768/uu-no-32-tahun-2004>
- Indonesia, P. R. (2010). *PP No. 71 Tahun 2010*. Database Peraturan | JDIIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>
- Indrayani, K. D., & Widiastuti, H. (2020). Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi (studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Klaten). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.18196/rab.040148>
- Lubis, F. K., Erlina, I. M., & Kumalasari, F. (2023). *Digital Accounting for Public Government Departments: A Theoretical Review*. http://www.pjls.edu.pk/pdf_files/2025_1/7372-7382.pdf
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi sektor publik-edisi terbaru*. Penerbit Andi. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=pBVCEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Mardiasmo,+2021&ots=z6vrYu3bID&sig=JwpHVS32rKsdZyFsgbYO T8Nc8go>
- Mashitoh, M., Pandowo, H. P. H., & Wibawa, K. D. W. K. D. (2024). Pengaruh Audit Internal, Pengendalian Internal, Kualitas Laporan Keuangan, Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan Laporan Keuangan. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 3(4), 108–121. <https://doi.org/10.55606/jekombis.v3i4.4125>
- Muranto, Ferisaati, & Banjarnahor, E. (2020). *Determinan Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa Dengan Keadilan Organisasi Sebagai Pemoderasi*.
- Nasution, D. A. D., Napitupulu, J. Y., & Buaya, R. L. (2025). A Systematic Literature Review of Internal Auditing in Public Sector Finance. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 413–430. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.509>
- Nogueira, S. P., & Jorge, S. (2024). *Perspectivas sobre o uso da informação financeira pública pelos políticos: Resultados recentes e desafios futuros*. <https://bibliotecadigital.ipb.pt/bitstreams/0c9e6df6-d93d-45d8-8f1e-25b3e2c63355/download>
- Pham, D. H., CHU, T. H., Nguyen, T. M. G., Nguyen, T. H. L., & Nguyen, T. N. (2021). Determinants of human resource accounting disclosures: Empirical evidence from Vietnamese listed companies. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(7), 129–137.
- Psikbpbkdev. (2023). *Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia*. <https://www.bpk.go.id/ihs/2023/II>
- Puspita, D., Fadli, F., & Halimatusyadiah, H. (2020). Pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pemahaman standar akuntansi pemerintah dan

- sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Seluma. *Jurnal Fairness*, 10(2), 79–88. <https://doi.org/10.33369/fairness.v10i2.15247>
- Sáenz, J., Alcalde-Heras, H., Aramburu, N., & Buenechea-Elberdin, M. (2024). Boosting innovativeness in organic farming: The role of external relational capital. *Journal of Intellectual Capital*, 25(1), 143–165. <https://doi.org/10.1108/JIC-11-2022-0229>
- Saini, M., Dhingra, B., & Yadav, M. (2023). ESG risk and financial performance of the Indian financial firms. *International Journal of Governance and Financial Intermediation*, 1(4), 304–314. <https://doi.org/10.1504/ijgfi.2023.131480>
- Sarker, N., & Sharif, M. J. (2024). The Role of Accounting Information System (AIS) in the Public Sector Budgetary Decision-Making Processes: Evidence from Bangladesh. *International Journal of Finance, Insurance and Risk Management*, 14(2), 113–130. <https://doi.org/10.35808/ijfirm/388>
- Setyowati, L., Isthika, W., & Pratiwi, R. D. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. *Kinerja*, 20(2), 179–191.
- Sudrajat, T., & Hartini, S. (2017). Rekonstruksi Hukum atas Pola Penanganan Pelanggaran Asas Netralitas Pegawai Negeri Sipil. *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM*, 29(3), 445–460.
- Sundari, H., & Rahayu, S. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung Tahun 2018). *eProceedings of Management*, 6(1). <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/8649>
- Trisnawati, N. N., & Wiratmaja, D. N. (2018). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, ISSN, 2302–8556. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v24.i01.p29>
- Van Der Wal, Z. (2017). *The 21st Century Public Manager*. Macmillan Education UK. <https://doi.org/10.1057/978-1-137-50744-0>
- Widyastuti, R. N., & Wulandari, I. (2024). Pengaruh Kompetensi SDM, Implementasi Akuntansi Akrua, Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Journal of Education Research*, 5(4), 5368–5375. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i4.1772>